

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan umum bidang sosial dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026.

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pontianak. Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak,

2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025....	7
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	18
3.1 Rencana Kerja.....	18
3.2 Pendanaan.....	34
BAB IV PENUTUP.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka Perangkat Daerah wajib membuat Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada pada Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2002-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
- 16) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868).
- 17) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
- 18) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
- 19) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

- 20) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 131).
- 21) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
- 22) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 15).
- 23) Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
- 24) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
- 25) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
- 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 adalah menyelaraskan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan ini dengan sistematika meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan EMPATI (Enerjik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan dan Inovatif) dengan :

- a. Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, tepat dan cepat.
- b. Melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih.
- c. Bekerja professional sesuai dengan aturan.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu Menurunnya Kemiskinan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial.
3. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu.

Berangkat dari sasaran tersebut kinerja yang akan dicapai dalam periode tahun 2024-2026 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, dimana hasil capaian tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024-2026.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Sosial Tahun 2025 (tahun berjalan) triwulan II dapat tergambar pada Anggaran dan Realisasi APBD pada tahun yang bersangkutan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun lalu bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Sosial Kota Pontianak telah menyusun anggaran dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota

Pontianak sampai dengan Tahun 2025 triwulan I dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 (JAN-MAR)

Indikator dan target kinerja DINAS SOSIAL Kota Pontianak yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
					6	7		8	9	13	14=13/8x100		15=7+13	16=15/6x100	17	18												
1	2	3	4	5																								
	Tujuan PD: Menurunnya Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat	4,3 - 4,4	%		4,3 - 4,4	%										Dinas Sosial Kota Ptk									
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	95	%	22,795,820,600	95	%	8,639,731,500	22.25	%	1,546,615,325	22	%	23.4	22	%	23.42	Sekretariat								
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	%	174,808,200	82	%	45,545,900	100	%	75,394,400	13	%	-	13	%	95	%	45,545,900	95	26.05	Sekretariat				
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	51,645,000	8	Dokumen	14,449,100	8	Dokumen	33,500,000	2	Dokumen	-	25	0.00	10	Dokumen	14,449,100	41.67	27.98	Sekretariat				
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	18,000,000	1	Dokumen	5,999,200	1	Dokumen	6,000,000	-	Dokumen	-	0	0.00	1	Dokumen	5,999,200	33.33	33.3288889	Sekretariat				
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	22,500,000	2	Dokumen	6,354,150	2	Dokumen	7,500,000	1	Dokumen	-	50	0.00	3	Dokumen	6,354,150	50.00	28.24066667	Sekretariat				
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Laporan	42,480,000	8	Laporan	9,301,950	8	Laporan	15,000,000	1	Laporan	-	12.5	0.00	9	Laporan	9,301,950	37.50	21.90	Sekretariat				
1.1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	40,183,200	5	Laporan	9,441,500	5	Laporan	13,394,400	-	Laporan	-	0	0.00	5	Laporan	9,441,500	33.33	23.50	Sekretariat				
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	100	%	14,200,881,000	100	%	4,646,562,465	100	%	5,594,482,000	44	%	1,170,789,006	44	%	1,170,789,006	44	20.93	144	%	5,817,351,471	144	40.96	Sekretariat	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang	13,329,921,000	28	Orang	4,433,673,065	34	Orang	5,304,162,000	29	Orang	1,140,329,006	85.29	21.50	28	Orang	5,574,002,071	34.57	41.82	Sekretariat				
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dokumen	826,200,000	12	Dokumen	207,530,000	12	Dokumen	275,400,000	3	Dokumen	30,460,000	3	Dokumen	30,460,000	25	11.06	15	Dokumen	237,990,000	41.67	28.81	Sekretariat	
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	54	Laporan	44,760,000	18	Laporan	5,359,400	18	Laporan	14,920,000	4	Laporan	-	22.22	0.00	22	Laporan	5,359,400	40.74	11.97	Sekretariat				
1.3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terkelolanya barang milik daerah dengan baik	100	%	4,790,000	100	%	1,145,000	100	%	1,145,000	-	%	-	0	0	100	%	1,145,000	100	23.9	Sekretariat				
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	4,790,000	1	Dokumen	1,145,000	1	Dokumen	1,145,000	-	Dokumen	-	100	0	2	Dokumen	1,145,000	66.67	23.90	Sekretariat				
1.4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	212,860,000	77	%	95,044,000	100	%	62,620,000	41	%	-	41	0.00	118	%	95,044,000	118	44.65	Sekretariat				
1.4.1		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210	Paket	127,860,000	108	Paket	95,044,000	70	Paket	42,620,000	58	paket	-	58	Paket	166	Paket	95,044,000	79.05	74.33	Sekretariat				

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=13x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
1.4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	85,000,000	- Orang	-	5 Orang	20,000,000	- Orang	-	- Orang	-	0	0	-	-	0	0	Sekretariat	
1.5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100 %	1,568,299,150	110 %	399,012,330	100 %	387,521,500	18 %	40,370,957	18 %	40,370,957	18	10.42	128 %	439,383,287	128	28.02	Sekretariat	
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	36 Paket	89,519,850	12 Paket	19,425,800	12 paket	18,000,000	3 paket	-	3 Paket	-	25	0.00	15 Paket	19,425,800	41.67	21.70	Sekretariat	
1.5.2		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	36 Paket	300,023,000	12 Paket	96,080,997	12 paket	90,011,500	3 paket	4,892,500	3 Paket	4,892,500	25	5.44	15 Paket	100,973,497	41.67	33.66	Sekretariat	
1.5.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	36 Paket	242,658,300	12 Paket	58,202,725	12 paket	70,000,000	3 paket	3,093,900	3 Paket	3,093,900	25	4.42	15 Paket	61,296,625	41.67	25.26	Sekretariat	
1.5.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Dokumen	7,500,000	12 Dokumen	2,640,000	12 Dokumen	2,500,000	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	25	0	15 Dokumen	2,640,000	41.67	35.20	Sekretariat	
1.5.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	36 Laporan	15,000,000	- Laporan	-	- Laporan	5,000,000	- Laporan	-	- Laporan	-	0	0	- Laporan	-	0	0	Sekretariat	
1.5.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	709,578,000	55 Laporan	172,859,808	34 laporan	150,000,000	8 laporan	32,384,557	8 Laporan	32,384,557	23.53	21.59	63 Laporan	205,244,365	65.63	28.92	Sekretariat	
1.5.7		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	204,020,000	1 Dokumen	49,803,000	12 Dokumen	52,010,000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0.00	0.00	1 Dokumen	49,803,000	2.78	24.41084207	Sekretariat	
1.6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,107,425,704	600 %	923,108,000	100 %	250,000,000	15 %	-	15 %	-	15	0.00	615 %	923,108,000	615.00	83.36	Sekretariat	
1.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	36 unit	1,107,425,704	78 Unit	923,108,000	13 Unit	250,000,000	2 Unit	-	2 Unit	-	15.38	0.00	80 Unit	923,108,000	222.22	83.36	Sekretariat	
1.7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,925,816,306	103 %	1,551,964,596	100 %	1,354,403,278	17 %	321,043,160	17 %	321,043,160	17.0	23.70	120 %	1,873,007,756	120	47.71	Sekretariat	
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	36,000,000	- Laporan	-	12 laporan	12,000,000	- laporan	-	- Laporan	-	0	0	- Laporan	-	0	0	Sekretariat	
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	766,518,706	12 Laporan	239,935,159	12 laporan	266,304,078	3 laporan	50,004,520	3 Laporan	50,004,520	25	18.78	15 Laporan	289,939,679	41.67	37.83	Sekretariat	
1.7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	60,000,000	2 Laporan	50,136,847	2 Laporan	55,000,000	- Laporan	-	- Laporan	-	0	0	2 Laporan	50,136,847	33.33	83.56141167	Sekretariat	
1.7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	3,063,297,600	13 Laporan	1,261,892,590	12 laporan	1,021,099,200	3 laporan	271,038,640	3 Laporan	271,038,640	25.0	26.54	16 Laporan	1,532,931,230	44.44	50.04	Sekretariat	
1.8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,600,940,240	167 %	843,196,000	100 %	914,165,322	30 %	14,412,202	30 %	14,412,202	31.3	1.58	197 %	857,608,202	197	53.57	Sekretariat	
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	477,360,000	9 Unit	193,223,500	12 unit	227,400,000	5 unit	14,412,202	9 Unit	14,412,202	75.0	6.34	8 Unit	207,635,702	88.89	43.50	Sekretariat	
1.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 unit	333,030,000	100 Unit	40,367,500	100 Unit	111,010,000	19 Unit	-	19 Unit	-	19	0.00	119 Unit	40,367,500	119	12.12	Sekretariat	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					6		7		8		9		13		14=13x100		15=7+13		16=15/6x100			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18
1.8.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	790,550,240	3 Unit	609,605,000	1 unit	575,755,322	- unit	-	- Unit	-	-	0	3 Unit	609,605,000	100	0.77	Sekretariat	
	Sasaran 1 PD: Meningkatkan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga dengan peningkatan potensi PSKS berfungsi untuk menjaga dan memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan. (Jumlah PSKS yang mengikuti pelatihan / Jumlah PSKS yang tersedia) x100%	100 %				100 %													
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keaktifan tingkat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Tingkat keaktifan PSKS dalam pemberdayaan masyarakat (jumlah PSKS yang dibina / populasi PSKS) x 100%	100 %	4,376,939,700	76,53 %	1,491,482,800	100 %	1,593,066,500	- %	148,446,400	- %	148,446,400	-	9.32	20.00 %	1,639,929,200	20	37.47	Bidang Pemberdayaan Sosial	
2.1		Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000	20 %	4,400,000	100 %	20,000,000	- %	-	- %	-	-	0.00	20 %	4,400,000	20	7.33		
2.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	60 Dokumen	60,000,000	5 Dokumen	4,400,000	20 Dokumen	20,000,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	-	0.00	5 Dokumen	4,400,000	8.33	7.33		
2.2		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	Terseleenggaranya Pengembangan PSKS	100 %	4,316,939,700	133 %	1,487,082,800	100 %	1,573,066,500	95.00 %	148,446,400	95 %	148,446,400	95	9.44	228 %	1,635,529,200	228.00	37.89	Bidang Pemberdayaan Sosial	
2.2.1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	1,477,397,100	19 Orang	453,206,100	50 Orang	592,465,700	50 Orang	30,027,000	50 Orang	30,027,000	100	5.07	69 Orang	483,233,100	115.00	32.71	Bidang Pemberdayaan Sosial	
2.2.2		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kab/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/ Kota	Meningkatnya kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	126 orang	1,171,201,600	41 Orang	326,465,800	42 Orang	410,600,800	40 Orang	52,000,000	40 Orang	52,000,000	95.24	12.66	81 Orang	378,465,800	64.29	32.31	Bidang Pemberdayaan Sosial	
2.2.3		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	111 Keluarga	1,131,037,000	109 Keluarga	671,905,500	27 Keluarga	400,000,000	14 Keluarga	65,154,400	14 Keluarga	65,154,400	51.9	16.29	123 Keluarga	737,059,900	110.81	65.17	Bidang Pemberdayaan Sosial	ASMAS
2.2.4		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/ Kota	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	21 Lembaga	390,000,000	3 Lembaga	35,505,400	7 Lembaga	120,000,000	1 Lembaga	1,265,000	1 Lembaga	1,265,000	14.29	1.05	4 Lembaga	36,770,400	19.05	9.43	Bidang Pemberdayaan Sosial	
2.2.5		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Sertifikat	147,304,000	- Sertifikat	-	20 Sertifikat	50,000,000	- Sertifikat		- Sertifikat	-	0	0	- Sertifikat	-	0	0	Bidang Pemberdayaan Sosial	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8	9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100	17	18								
	Sasaran 2 PD: Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun kewenangan Kab/Kota (Jumlah PMKS yang dilayani / Jumlah PMKS yang sudah tervalidasi) x100%	100	%		%	100	%																		
3		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani/Populasi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan) x100%	100	%	14,960,000	200,000	100	%	2,480,000	60.00	%	-	60	0.000	80	200,000	80.00	1.34	Bidang Rehabilitasi Sosial							
3.1		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal	Meningkatnya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal	100	%	14,960,000	200,000	100	%	2,480,000	60.00	%	-	60	0.00	80	200,000	80.00	1.34	Bidang Rehabilitasi Sosial							
3.1.1		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	15	Orang	14,960,000	1	200,000	5	Orang	2,480,000	3	Orang	-	60	0.00	4	200,000	26.67	1.34	Bidang Rehabilitasi Sosial						
4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun kewenangan Kab/Kota (Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan/ populasi PMKS) x 100%	100	%	3,151,777,200	124	1,076,208,440	100	%	1,209,273,400	43.00	%	206,220,000	43	17.05	167	1,282,428,440	167	40.69	Bidang Rehabilitasi Sosial						
4.1		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	Meningkatnya penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100	%	2,677,311,600	260	1,001,124,700	100	%	1,051,118,200	33.00	%	150,120,000	33	14.28	293	1,151,244,700	293	43.00	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM					
4.1.1		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan permakanan per orang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	23,385	Orang	1,447,980,000	7,428	476,665,000	7,795	Orang	475,000,000	73	Orang	120,240,000	73	Orang	120,240,000	0.9	25.31	7,501	Orang	596,905,000	32.08	41.22	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM	
4.1.2		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	900	orang	391,920,400	300	Orang	172,110,000	300	Orang	120,960,200	6	Orang	-	6	Orang	-	2	0.00	306	Orang	172,110,000	34	43.91	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM
4.1.3		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	15	orang	237,420,000	58	Orang	119,680,000	50	Orang	258,710,000	-	Orang	-	-	Orang	-	0	0.00	58	Orang	119,680,000	386.67	50.41	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM
4.1.4		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120	orang	14,940,000	97	Orang	2,700,000	40	Orang	4,980,000	13	Orang	-	13	Orang	-	32.5	0	110	Orang	2,700,000	91.6666667	18.07	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM
4.1.5		Pemberian Bimbingan Fisik,Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian bimbingan fisik, mental, Spiritual dan sosial kewenangan Kab/Kota	150	orang	70,825,600	148	Orang	12,376,000	50	Orang	20,412,800	51	Orang	-	51	Orang	-	102	0.00	199	Orang	12,376,000	132.67	17.47	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trivulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Trivulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					6		7		8		9		13		14=13x100		15=7+13		16=15/6x100			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18
4.1.6		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	145,725,600	280 Orang	65,552,300	100 Orang	48,575,200	11 Orang	-	11 Orang	-	11	0.00	291 Orang	65,552,300	97.00	44.98	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM
4.1.7		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang membutuhkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	120 orang	14,960,000	24 Orang	2,700,000	40 Orang	4,980,000	18 Orang	-	18 Orang	-	45	0	42 Orang	2,700,000	35.00	18.05	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4.1.8		Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	180 orang	44,940,000	73 Orang	12,200,000	60 Orang	14,980,000	24 Orang	1,200,000	24 Orang	1,200,000	40.00	8.01	97 Orang	13,400,000	53.89	29.82	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4.1.9		Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	184,740,000	337 Orang	104,941,400	200 Orang	61,580,000	74 Orang	20,480,000	74 Orang	20,480,000	37	33.26	411 Orang	125,421,400	68.50	67.89	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4.1.10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	95,940,000	7 Orang	21,800,000	10 Orang	31,980,000	3 Orang	7,500,000	3 Orang	7,500,000	30	23.45	10 Orang	29,300,000	33.3	30.5	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM
4.1.11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	12,960,000	95 Orang	2,700,000	40 Orang	3,980,000	15 Orang	-	15 Orang	-	37.5	0.00	110 Orang	2,700,000	91.67	20.83	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM
4.1.12		Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	240 orang	14,960,000	228 Orang	7,700,000	80 Orang	4,980,000	44 Orang	700,000	44 Orang	700,000	55	14.06	272 Orang	8,400,000	113.33	56.15	Bidang Rehabilitasi Sosial	SPM
4.2		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase pemenuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti	100 %	474,465,600	119 %	75,083,740	100 %	158,155,200	54.00 %	56,100,000	54 %	56,100,000	54	35.47	173 %	131,183,740	173	27.65	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan kewenangan Kab/ Kota	- Orang	-	107 Orang	12,588,240	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	107 Orang	12,588,240	107	107.00	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4.2.1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian bimbingan fisik, mental, Spiritual dan sosial kewenangan Kab/Kota	900 orang	111,525,600	315 Orang	39,395,500	300 Orang	37,175,200	360 Orang	46,800,000	360 Orang	46,800,000	120	125.89	675 Orang	86,195,500	75	77.29	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4.2.2		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	362,940,000	103 Orang	23,100,000	50 Orang	120,980,000	21 Orang	9,300,000	21 Orang	9,300,000	42	7.69	124 Orang	32,400,000	82.67	8.93	Bidang Rehabilitasi Sosial	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026		Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18														
	Sasaran 3 PD: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial Sesuai Standar Waktu		Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial sesuai Data yang terverifikasi dan tervalidasi baik bersumber APBD maupun APBN (Jumlah KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / populasi KPM) x100%	100	%	%		100	%																										
5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Tingkat perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin warga kota Pontianak (Jumlah KPM yang mendapat pelayanan perlindungan dan jaminan sosial / populasi KPM) x100%	100	%		9,485,831,600	133	%		3,172,577,550	100	%		3,634,980,000	50.00	%		1,667,375,000	50	%		-	50	0.00	183	%		3,172,577,550	183		33.45	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial		
5.1		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui	Meningkatnya pengelolaan data fakir miskin warga Kota Pontianak	100	%		9,485,831,600	133	%		3,172,577,550	100	%		3,634,980,000	50.00	%		1,667,375,000	50	%		1,667,375,000	50		45.87	183	%		4,839,952,550	183		51.02	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	
5.1.1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120,000	Orang		1,577,255,000	47,322	Orang		610,470,450	40,000	Orang		450,000,000	857	Orang		15,855,000	857	Orang		15,855,000	2.1		3.52	#####	Orang		626,325,450	40.15		39.71	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	
5.1.2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengentasan keluarga fakir miskin Kabupaten/Kota	60,000	Keluarga		104,940,000	40,106	Keluarga		172,446,500	20,000	Keluarga		34,980,000	1,060	Keluarga		-	1,060	Keluarga		-	5.3	0.00	#####	Keluarga		172,446,500	68.61		164.33	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial		
5.1.3		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhihya orang yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000	Keluarga		7,725,910,200	11,342	Keluarga		2,259,685,600	10,000	Keluarga		2,850,000,000	#####	Keluarga		1,651,520,000	#####	Keluarga		1,651,520,000	142.28		57.95	#####	Keluarga		3,911,205,600	85.23		50.62	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	
5.1.4		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhihya orang yang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang		77,726,400	121	Orang		129,975,000	100	Orang		300,000,000	-	Orang		-	-	Orang		-	0	0.00	121	Orang		129,975,000	40.33		167.22	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial		
6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Meningkatnya pelayanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial (Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dilayani / populasi korban bencana alam dan bencana sosial) x100%	100	%		1,317,741,900	215	%		292,046,000	100	%		410,680,600	26.00	%		25,960,000	26	%		-	26	0.00	241	%		292,046,000	241.00		22.16	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	SPM	
6.1		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	100	%		1,233,050,100	141	%		192,625,000	100	%		382,450,000	51.00	%		25,960,000	51	%		25,960,000	51		6.79	192	%		218,585,000	192		17.73	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	SPM
6.1.1		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhihya orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1,050	Orang		426,270,000	323	Orang		100,745,000	350	Orang		142,090,000	762	Orang		24,460,000	762	Orang		24,460,000	217.71		17.21	1,085	Orang		125,205,000	103.33		29.37	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	SPM
6.1.2		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhihya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang		477,675,000	338	Orang		51,195,000	200	Orang		159,225,000	35	Orang		1,500,000	35	Orang		1,500,000	17.5		0.94	373	Orang		52,695,000	62.17		11.03	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	SPM
6.1.3		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota	300	Unit		100,000,000	23	Unit		6,850,000	100	Unit		20,000,000	22	Unit		-	22	Unit		-	22	0.00	45	Unit		6,850,000	15.00		6.85	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	SPM	
6.1.4		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang mendapat bantuan	Terpenuhihya orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang		94,105,100	17	Orang		21,415,000	40	Orang		31,135,000	-	Orang		-	-	Orang		-	0	0.00	17	Orang		21,415,000	14.17		22.76	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	SPM	
6.1.5		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhihya pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	36	Orang		135,000,000	16	Orang		12,420,000	12	Orang		30,000,000	-	Orang		-	-	Orang		-	0.00	0.00	16	Orang		12,420,000	44.44		9.2	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	SPM	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026		Tahun	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6			7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
6.2		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	100 %	84,691,800		288 %	99,421,000	100 %	28,230,600	- %	-	- %	-	0	0	288 %	99,421,000	2.88	1.17		
6.2.1		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	84,691,800		144 Orang	99,421,000	50 Orang	28,230,600	- Orang	-	- Orang	-	0	0	144 Orang	99,421,000	96	1.17		
JUMLAH						41,143,071,000					15,490,212,000		3,594,616,725										
Rata-rata capaian kinerja (%) Program														#### %		33.74 %	#### %		119.07 %		% Program		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja (%) Kegiatan														37.54 %		37.54 %	182.54 %		182.54 %		% Kegiatan		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja (%) sub Kegiatan																34.54 %			68.36 %		% sub Kegiatan		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah					Sangat Rendah		Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :				1 Adanya komitmen dalam peningkatan pelayanan																			
				2 Pemanfaatan inovasi digital D MASTER dalam pencatatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan bansos																			
				3 Komitmen Kepala Dinas Sosial dalam peningkatan kinerja pelayanan																			
				4 Kerjasama dengan Pekerja Sosial di Kecamatan dan Relawan Sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial di Kota Pontianak																			
				5 Crosscutting antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dapat terlaksana																			
				6 Pemanfaatan inovasi BDESUT untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja :				1 Bantuan yang belum tepat sasaran sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial APBD maupun APBD																			
				2 Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ahli psikologi dan analis bencana yang dapat membantu ketika terjadi bencana dan pasca bencana																			
				3 Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)																			
				4 Kurangnya integrasi pemangku kepentingan yang melayani PPKS																			
				5 Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak yang hanya dapat melayani PPKS di luar pantai selama 7 (tujuh) hari																			
				6 Kepedulian masyarakat terkait masalah sosial yang masih kurang																			
				7 Peningkatan kemampuan yang harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)																			
				8 Kurangnya sumber daya PSKS yang kompeten																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :																							

I. Penjelasan pada Kegiatan dengan capaian kurang dari 25% :

- a. Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan pada pertengahan sampai akhir tahun
- b. Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- c. Pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan akhir tahun
- d. Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- e. Pada sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan terlaksana 8% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- f. Pada sub kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- g. Pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- h. Pada sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya terlaksana 15% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- i. Pada sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- j. Pada sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- k. Pada sub kegiatan Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- l. Pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota terlaksana 23,7% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- m. Pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- n. Pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya jika tidak ada perubahan
- o. Pada sub kegiatan Penyediaan sandang kegiatan Rehabilitasi Sosial terlaksana 2% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- p. Pada sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- q. Pada sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat terlaksana 11% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- r. Pada sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar pantai belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- s. Pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan bertahap setiap triwulan
- t. Pada sub kegiatan Fasilitas bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
- u. Pada sub kegiatan Penyediaan Sandang terlaksana 18% hanya dilaksanakan pada saat terjadi bencana
- v. Pada sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan belum terlaksana (0%), hanya dilaksanakan pada saat terjadi bencana
- w. Pada sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial belum terlaksana (0%), hanya dilaksanakan pada saat terjadi bencana
- x. Pada sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026	Tahun	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									I							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 sampai dengan triwulan I telah sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2025, alokasi anggaran keseluruhan Dinas Sosial Kota Pontianak mencapai Rp. 15.307.587.431,00 dengan rincian:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 14.780.529.882,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp. 527.057.549,00.

Capaian Realisasi Anggaran sampai dengan 27 Mei 2025 sebesar Rp. 5.322.411.045,00 atau 34,77%.

Reviu terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dijelaskan per kegiatan yang capaian sudah tinggi maupun masih rendah adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pelaksanaannya baru mencapai 13% dikarenakan terdapat dokumen yang akan direalisasikan pada triwulan 3 dan triwulan 4.
- 2) Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pelaksanaannya mencapai 44% sudah dilaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD telah terlaksana 25% dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD terlaksana 22,22%.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksana 41% dikarenakan telah dilaksanakannya pengadaan Pakaian Dinas.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 18% dikarenakan sudah terlaksana kegiatan-kegiatan pada triwulan I.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana sebanyak 15% karena sudah dilakukan belanja modal.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya terlaksana sebanyak 17% pada triwulan I.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah terlaksana 30% untuk pembayaran pajak Kendaraan Dinas.

- 8) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota terlaksana 95% karena sudah dilaksanakan pelatihan untuk PSM, TKSK dan Pendamping Rehabilitasi Sosial pada triwulan I.
- 9) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal telah memulangkan 3 (tiga) orang PPKS Korban Tindak Kekerasan atau sebesar 60% pada triwulan I.
- 10) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial telah terlaksana 33% pada triwulan I.
- 11) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial telah terlaksana 54% pada triwulan I.
- 12) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana 50% pada triwulan I dikarenakan telah disalurkan Bantuan Sosial Tuna kepada 1060 Keluarga Penerima Manfaat.
- 13) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota telah terlaksana 51% pada triwulan I.

Penjelasan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 . Rencana Kerja

Program Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2026, selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dan kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rincian yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju rencana tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, review terhadap kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Adapun program kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan serta 58 sub kegiatan, rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Untuk pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 15.490.212.000,00 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), sedangkan pagu anggaran Renja Perubahan sebesar Rp. 15.314.115.533,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Pontianak Tahun 2025.

Rumusan perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						DINAS SOSIAL							15.490.212.000,00	15.760.932.164,00	15.314.115.533,00							13.764.357.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.490.212.000,00	15.760.932.164,00	15.314.115.533,00							13.764.357.000,00		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							15.490.212.000,00	15.760.932.164,00	15.314.115.533,00							13.764.357.000,00		
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	8.639.731.500,00	8.842.170.564,00	8.608.819.593,00							7.572.025.200,00		
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	75.394.400,00	75.394.800,00	75.394.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		60.394.400,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	33.500.000,00	33.500.800,00	33.500.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			18.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.665.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			6.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				15.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	13.394.400,00	13.394.000,00	10.715.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				13.394.400,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	5.594.482.000,00	5.763.402.164,00	5.763.402.164,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak			4.783.627.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	5.304.162.000,00	5.519.882.164,00	5.519.884.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				4.493.307.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																			

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	275.400.000,00	228.600.000,00	228.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			275.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					18 Laporan	18 Laporan	14.920.000,00	14.920.000,00	11.936.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			14.920.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-				100 %	100 %	1.145.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.145.000,00	1.132.000,00	905.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-				-	100 %	62.620.000,00	81.460.000,00	81.460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		87.620.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	42.620.000,00	48.960.000,00	63.660.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			42.620.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	2 Orang	20.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			45.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	387.521.500,00	437.888.600,00	437.888.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		638.226.050,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	16.678.450,00	13.891.563,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			29.839.950,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.011.500,00	85.952.350,00	86.906.280,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	65.959.800,00	48.626.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			80.886.100,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	4.998.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					34 Laporan	15 Laporan	150.000.000,00	209.790.000,00	111.375.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	52.010.000,00	52.010.000,00	40.185.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	62.094.000,00	55.840.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.021.099.200,00	1.015.953.080,00	1.109.753.880,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				1.021.099.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	935.424.322,00	909.094.322,00	909.094.322,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak			370.130.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	11 Unit	227.400.000,00	218.030.000,00	218.030.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				159.120.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	111.010.000,00	110.580.000,00	77.406.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				111.010.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	4.980.000,00	6.440.000,00	3.952.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	100 Orang	20.412.800,00	13.585.600,00	9.968.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	150 Orang	48.575.200,00	51.925.200,00	34.634.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			48.575.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																	
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	30 Orang	4.980.000,00	6.440.000,00	3.952.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	14.980.000,00	36.191.400,00	31.191.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			14.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					200 Orang	200 Orang	61.580.000,00	101.907.400,00	98.296.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			61.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	20 Orang	31.980.000,00	32.525.000,00	57.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			31.980.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	3.980.000,00	6.440.000,00	3.952.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	4.980.000,00	10.135.000,00	5.708.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	-			100 %	100 %	158.155.200,00	145.781.600,00	145.781.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat		158.155.200,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	375 Orang	37.175.200,00	56.451.800,00	54.657.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			37.175.200,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		

							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	100 Orang	120.980.000,00	89.329.800,00	67.009.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				120.980.000,00	DINAS SOSIAL
5	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM				-	100 %	3.634.980.000,00	3.730.377.000,00	3.792.449.500,00									3.023.935.100,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui	-			-	100 %	3.634.980.000,00	3.730.377.000,00	3.730.377.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat			3.023.935.100,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40000 Orang	23283 Orang	450.000.000,00	502.145.200,00	410.644.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				450.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				20000 Keluarga	20000 Keluarga	34.980.000,00	34.914.800,00	161.142.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				34.980.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	4312 Keluarga	2.850.000.000,00	2.896.301.200,00	2.920.661.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				2.512.955.100,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																			

[illegible]

[illegible]

3.2. Pendanaan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, penganggaran untuk program dan kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 8.639.731.500,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 8.615.569.393,00 dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

b. **Program Pemberdayaan Sosial**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.593.066.500,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.472.503.100,00 dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

c. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 2.700.000,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.714.000,00 dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

d. **Program Rehabilitas Sosial**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.209.273.400,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.141.060.540,00 dengan 2 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

e. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 3.634.980.000,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 3.785.699.700,00 dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

f. **Program Penanganan Bencana**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 410.680.600,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 297.568.800,00 dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Rincian perubahan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2025**

PROVINSI/KAB/KOTA : PONTIANAK
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) SEMULA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) SESUDAH	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI			RKPD 2025	RKPD 2025 PERUBAHAN	RKPD 2025 (Rp.)	RKPD 2025 PERUBAHAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WAJIB BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN BIDANG/BAGIAN TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN BIDANG/BAGIAN TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN	95%	95%	8.639.731.500	8.615.569.393	
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	100%	75.394.400	75.394.400	
		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9 Dokumen	9 Dokumen	33.500.000	33.500.000	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	4.665.000	

		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	6.000.000	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8 Laporan	8 Laporan	15.000.000	12.000.000	
		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5 Laporan	5 Laporan	13.394.000	10.715.200	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100%	100%	5.594.482.000	5.763.402.164	EVALUASI JUMLAH PEGAWAI YANG MASUK DAN PENSIUN
		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	34Orang/ Bulan	34 Orang/ Bulan	5.304.162.000	5.519.884.000	EVALUASI JUMLAH PEGAWAI YANG MASUK DAN PENSIUN
		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	275.400.000	228.600.000	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD DAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD DAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/	18 Laporan	18 Laporan	14.920.000	11.936.000	

				TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD					
		KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	100%	100%	1.145.000	905.600	
		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.145.000	905.600	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100%	100%	62.620.000	81.460.000	
		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANN YA	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANN YA	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN	70 Paket	2 Paket	42.620.000	63.660.000	Penambahan paket pakaian dinas untuk CPNS dan PPPK
		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	5 Orang	2 Orang	20.000.000	32.500.000	Peningkatan kinerja ASN
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	100%	387.521.500	437.888.600	
		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 Paket	4 Paket	18.000.000	13.891.563	

		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 Paket	4 Paket	90.011.500	86.906.280	
		PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	12 Paket	12 Paket	70.000.000	55.375.840	
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	2.500.000	
		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	34 Laporan	34 Laporan	150.000.000	111.375.000	Peningkatan Koordinasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan pengantaran ODGJ ke RSJ Provinsi Kalbar di Singkawang
		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH DOKUMEN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH DOKUMEN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	52.010.000	40.185.000	
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%	250.000.000	183.439.000	
		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	13 Unit	21 Unit	250.000.000	183.439.000	
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN	100%	100%	1.542.700.629	1.542.700.629	

		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH DAERAH					
		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12 Laporan	0 Laporan	12.000.000	0	Refocusing Anggaran
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	12 Laporan	12 Laporan	245.045.078	267.885.825	
		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	2 Laporan	2 Laporan	55.000.000	55.840.000	
		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 Laporan	12 Laporan	1.021.099.200	1.109.753.880	
		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	935.424.322	909.094.322	
		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	12 Unit	11 Unit	227.400.000	218.030.000	

		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	100 Unit	100 Unit	111.010.000	77.406.000	
		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI	1 Unit	1 Unit	597.014.322	468.614.405	Refoving Anggaran
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE TINGKAT KEAKTIFAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE TINGKAT KEAKTIFAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	100%	100%	1.593.066.500	1.472.503.100	
		KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE FASILITASI KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE FASILITASI KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%	19.957.000	19.957.000	
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000	19.957.000	
		KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PELAYANAN PEKERJA SOSIAL BAGI MASYARAKAT	PERSENTASE PELAYANAN PEKERJA SOSIAL BAGI MASYARAKAT	100%	100%	1.573.066.500	1.551.687.400	
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN	JUMLAH ORANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	50 Orang	50 Orang	592.465.700	545.049.300	Refocusing Anggaran

		KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/ KOTA							
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/KOTA	JUMLAH TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/KOTA	42 Orang	42 Orang	410.600.800	486.437.000	Refocusing Anggaran
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	27 Keluarga	44 Keluarga	400.000.000	378.556.000	
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	7 Lembaga	20 Lembaga	120.000.000	27.061.600	
		PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	JUMLAH SERTIFIKAT YANG DARI HASIL PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	JUMLAH SERTIFIKAT YANG DARI HASIL PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	20 Sertifikat	20 Sertifikat	50.000.000	19.568.000	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE TINGKAT PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE TINGKAT PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100%	100%	2.480.000	1.714.000	

		KEGIATAN PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	KEGIATAN PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	PERSENTASE PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	PERSENTASE PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	100%	100%	2.480.000	1.714.000	
		FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KAB/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KAB/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	JUMLAH WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	5 Orang	5 Orang	2.480.000	1.714.000	
		PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	100%	100%	1.209.273.400	1.141.060.540	
		KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK	PERSENTASE TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN BANTUAN SOSIAL	PERSENTASE TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN BANTUAN SOSIAL	100%	100%	1.051.118.200	1.064.289.600	

		TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL	TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL							
		PENYEDIAAN PERMAKINAN	PENYEDIAAN PERMAKINAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PERMAKINAN SESUAI DENGAN STANDAR GIZI MINIMAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PERMAKINAN SESUAI DENGAN STANDAR GIZI MINIMAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	7795 Orang	200 Orang	475.000.000	498.800.000	
		PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN SANDANG	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA PAKAIAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA YANG TERSEDIA DALAM 1 TAHUN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA PAKAIAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA YANG TERSEDIA DALAM 1 TAHUN KEWENANGAN KAB/ KOTA	300 Orang	300 Orang	120.960.200	41.860.000	
		PENYEDIAAN ALAT BANTU	PENYEDIAAN ALAT BANTU	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN ALAT BANTU DAN ALAT BANTU PERAGA SESUAI KEBUTUHAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN ALAT BANTU DAN ALAT BANTU PERAGA SESUAI KEBUTUHAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	50 Orang	50 Orang	258.710.000	229.860.000	
		PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	40 Orang	40 Orang	4.980.000	3.952.000	
		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	50 Orang	100 Orang	20.412.800	9.968.480	

				KEWENANGAN KAB/ KOTA	KEWENANGAN KAB/ KOTA					
		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	100 Orang	150 Orang	48.575.200	34.634.560	
		FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH DAN KARTU IDENTITAS ANAK	FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH DAN KARTU IDENTITAS ANAK	JUMLAH ORANG YANG TERPENUHI KEBUTUHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS	JUMLAH ORANG YANG TERPENUHI KEBUTUHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS	40 Orang	30 Orang	4.980.000	3.952.000	
		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR KEWENANGAN KAB/ KOTA	60 Orang	60 Orang	14.980.000	31.191.400	
		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	200 Orang	200 Orang	61.580.000	98.296.000	
		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN	10 Orang	20 Orang	31.980.000	57.220.000	

				KEDARURATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	KEDARURATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA					
		PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	40 Orang	40 Orang	3.980.000	3.952.000	
		PEMBERIAN PELAYANAN RUJUKAN	PEMBERIAN PELAYANAN RUJUKAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN RUJUKAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN RUJUKAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	80 Orang	80 Orang	4.980.000	5.708.000	
		KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	100%	100%	158.155.200	145.781.600	
		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	300 Orang	375 Orang	37.175.200	54.657.000	
		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN	JUMLAH PESERTA DALAM PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	JUMLAH PESERTA DALAM PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	50 Orang	100 Orang	120.980.000	67.009.100	

		HIV/AIDS DAN NAPZA	HIV/AIDS DAN NAPZA	KEWENANGAN KAB/ KOTA	KEWENANGAN KAB/ KOTA					
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)	PERSENTASE PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)	100%	100%	3.634.980.000	3.785.699.700	
		KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TERSEDIANYA DATA FAKIR MISKIN WARGA KOTA PONTIANAK	PERSENTASE DATA FAKIR MISKIN WARGA KOTA PONTIANAK YANG DIPERBAHARUI	100%	100%	3.634.980.000	3.785.699.700	
		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA YANG DIDATA	JUMLAH FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA YANG DIDATA	40.000 Orang	28.283 Orang	450.000.000	410.644.800	
		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN PENGENTASAN FAKIR MISKIN KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN PENGENTASAN FAKIR MISKIN KAB/ KOTA	20.000 Keluarga	20.000 Keluarga	34.980.000	161.142.800	
		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	10.000 Keluarga	4312 Keluarga	2.850.000.000	2.920.661.900	
		FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	JUMLAH ORANG MENDAPATKAN BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH ORANG MENDAPATKAN BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	100 Orang	100 Orang	300.000.000	293.250.200	

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	100%	100%	410.680.600	297.568.800	
		KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	PERSENTASE PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	100%	100%	382.450.000	269.305.000	
		PENYEDIAAN MAKANAN	PENYEDIAAN MAKANAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PERMAKINAN 3X1 HARI DALAM MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PERMAKINAN 3X1 HARI DALAM MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) KEWENANGAN KAB/ KOTA	350 Orang	300 Orang	142.090.000	113.052.000	
		PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN SANDANG	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN SANDANG YANG TERSEDIA PADA MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) DAN PASCA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN SANDANG YANG TERSEDIA PADA MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) DAN PASCA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	200 Orang	200 Orang	159.225.000	70.508.000	
		PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGS	PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGS	JUMLAH TEMPAT PENGUNGSIAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH TEMPAT PENGUNGSIAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	100 Unit	100 Unit	20.000.000	21.341.000	
		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	JUMLAH KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPAT BANTUAN	JUMLAH KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPAT BANTUAN	40 Orang	40 Orang	31.135.000	32.389.000	
		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	12 Orang	12 Orang	30.000.000	31.335.000	

		KEGIATAN PENYELENGGAR AAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PENYELENGGAR AAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA BENCANA KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	100%	100%	28.230.600	28.943.800		
		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	50 Orang	50 Orang	28.230.600	28.943.800		
TOTAL									15.490.212.000	15.314.115.533	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan persoalan masyarakat khususnya dalam bidang sosial sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kehidupan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang berharkat dan bermartabat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang sesuai Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial Kota Pontianak. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak ini disusun sebagai bahan acuan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2025, dengan Renja Perubahan ini pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**



drg. TRISNAWATI, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730610 200012 2 004